



LAPORAN DELEGASI DPR RI THE 69TH SESSION OF THE COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN

9-14 Maret 2025, New York - Amerika Serikat





**LAPORAN
DELEGASI DPR RI
THE 69TH SESSION
OF THE COMMISSION
ON THE STATUS OF
WOMEN**

9-14 Maret 2025
New York - Amerika Serikat



LAPORAN

DELEGASI BKSAP DPR RI KE THE 69TH SESSION OF THE COMMISSION ON THE STATUS OF WOMEN “PARLIAMENTS AND BEIJING +30: RESISTING THE BACKLASH AND SHIFTING PARADIGMS TOWARDS GENDER EQUALITY”

9-14 Maret 2025, Markas Besar PBB, New York – Amerika Serikat

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) berlangsung dari tanggal 10 hingga 21 Maret 2025, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat. Sesi ini menandai peringatan 30 tahun Deklarasi dan Platform Aksi Beijing (BPFA), sebuah kerangka kerja penting untuk memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan secara global.

Pada CSW69, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI menghadiri event parlemen yang dihelat IPU bekerja sama dengan UN Women dengan tema “Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality” pada tanggal 11 Maret 2025.

CSW69 menyediakan platform penting bagi negara anggota, entitas PBB, dan organisasi non-pemerintah untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi untuk memajukan kesetaraan gender. Sesi ini bertujuan untuk menginspirasi dan mendukung generasi pemimpin perempuan berikutnya dan menciptakan dunia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk semua.

Selain Pertemuan Parlemen, IPU juga menyelenggarakan *side event* tentang Perubahan Norma Sosial, Jejaring, dan Advokasi Global untuk Memajukan Partisipasi Politik dan Pengambilan Keputusan Perempuan.

B. Dasar Pengiriman Delegasi

Pengiriman Delegasi BKSAP DPR RI ke Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/KU.05.01/ST/KSOI/1/2025

C. Susunan Delegasi

Susunan Delegasi BKSAP DPR RI, yang menghadiri sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) 12 Maret 2025, di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat terdiri dari:

No.	Nama	Fraksi	Jabatan
1.	Irine Yusiana Roba	F. P-PDIP	Wakil Ketua BKSAP / Ketua Delegasi
2.	M. Husein Fadlulloh	F. Gerindra	Wakil Ketua BKSAP / Anggota Delegasi
3.	Diah Pikatan Orissa Putri	F. PDIP	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
4.	Rio Alexander Dondokambey	F. PDIP	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
5.	Adde Rossi Khoerunnisa	F. Golkar	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi
6.	Saraswati Djojohadikusumo	F. Gerindra	Anggota BKSAP / Anggota Delegasi

Selama mengikuti persidangan, Delegasi BKSAP didampingi oleh Pejabat dari Fungsi Maritim, Tata Kelola PBB, dan Isu Kemanusiaan PTRI New York, satu orang sekretaris dari Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI, dan satu orang Tenaga Ahli BKSAP DPR RI.

D. Maksud dan Tujuan Pengiriman Delegasi

Maksud dan tujuan pengiriman delegasi BKSAP DPR RI ke Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69), adalah sebagai berikut:

1. Ikut berperan dalam memajukan BPFA di tingkat nasional dan internasional.
2. Ikut menunjukkan aspirasi dan komitmen Indonesia dalam memperjuangkan kesetaraan gender di forum internasional. Lewat kehadiran ini, DPR RI menyampaikan pandangan dan rekomendasi terkait perlindungan serta pemberdayaan perempuan dalam konteks global.
3. Ikut mengadvokasi dan mendorong penyusunan kebijakan nasional yang sejalan dengan standar internasional terkait hak dan peran perempuan.
4. Partisipasi dalam Sesi ke-69 CSW memberikan kesempatan untuk bertukar gagasan, pengalaman, dan praktik terbaik dengan delegasi dari berbagai negara terkait dengan strategi-strategi efektif dalam memajukan kesetaraan gender.
5. Penguatan diplomasi parlemen di mana DPR RI berperan sebagai jembatan antara kebijakan nasional dan forum internasional untuk mendukung agenda Indonesia di bidang kesetaraan gender.

E. Misi Delegasi

Misi Delegasi DPR-RI dalam pertemuan Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) adalah:

1. Memperbarui komitmen Indonesia terhadap Deklarasi Beijing dan Platform Aksi pada peringatan 30 tahunnya, dengan menitikberatkan pada langkah-langkah progresif seperti penegakan kebijakan yang responsif terhadap gender dalam pengambilan keputusan.
2. Memperbarui komitmen Indonesia terhadap Deklarasi Beijing dan Platform Aksi pada peringatan 30 tahunnya, dengan menitikberatkan pada langkah-langkah progresif seperti penegakan kebijakan yang responsif terhadap gender dalam pengambilan keputusan.
3. Memperkuat peran diplomasi DPR RI dalam forum parlemen global.
4. Sebagai wujud peran aktif DPR RI terkait keanggotaannya di IPU dan PBB untuk membahas tema dan isu-isu yang menjadi agenda pembicaraan pertemuan khususnya.
5. Membangun kemitraan dan kerja sama di antara negara-negara anggota PBB dan IPU dalam kesetaraan gender.
6. Mengidentifikasi strategi dan prioritas global dan berkomitmen pada kebijakan dan rencana aksi untuk kesetaraan gender.
7. Fokus pada pencapaian kesetaraan dalam pengambilan keputusan.

F. Persiapan Pengiriman Delegasi

Serangkaian persiapan telah dilakukan dalam menghadiri Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) ini. Setelah Pimpinan DPR RI memberikan persetujuannya untuk mengirim delegasi, dilanjutkan dengan mengadakan rapat Delegasi yang dilaksanakan pada tanggal 5 Maret 2025. Bahan-bahan masukan dan poin intervensi mendapatkan masukan dari Kementerian Luar Negeri.



II. ISI LAPORAN

A. Agenda Sidang

PARLIAMENTS AND BEIJING +30: RESISTING THE BACKLASH AND SHIFTING PARADIGMS TOWARDS GENDER EQUALITY

WAKTU	AGENDA
Selasa, 11 Maret 2025	
09:45–10:00	Arrival of delegates
10:00–10:15	Opening remarks • IPU • UN-Women
10:15–12:00	Session 1: Women's political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity Participants will review the latest data and resources on women in politics. These include the IPU's report <i>Women in Parliament 2024</i> and the IPU-UN Women 2025 Map Women in Politics. The session will provide space to take stock of the global state of women's representation in political decision-making over the past 30 years, highlighting progress and persistent challenges, and identifying lessons learned. It will also provide an opportunity to take a look at the elections held in 2024 and their outcomes in terms of women's political representation. The session will focus on the following questions: • What progress has been made in advancing women's representation in parliament and political leadership globally over the past 30 years?

	• What are the main observations drawn from the 2024 election results regarding women's participation in decision-making? • What are the barriers blocking greater progress and how can they be addressed? • What lessons can be drawn from countries that have demonstrated significant progress towards gender parity in politics, and how can these successes inform global efforts? • How can we inspire and support the next generation of women leaders to take on political roles? Intervention:
12:00–13:00	Special segment: Panel discussion on shifting the paradigm towards parity Presentation of General Recommendation 40 of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) on the equal and inclusive representation of women in decision-making systems followed by a Q&A session with participants.
13:00–15:00	Lunch break
15:00–17:00	Session 2: Pushing back against the pushback This session will focus on setbacks and dangers of pushbacks that hinder progress on gender equality and women's rights, and primarily on parliamentary action needed to address such challenges. The participants will identify pushbacks, their supporting forces and the damage they cause. They will also explore actionable solutions to reverse the backlash and sustain momentum towards gender equality, including through global partnerships, towards the implementation of the BPfA and SDG agendas. The session will focus on the following questions: • In which areas are pushbacks most pervasive and what damage are they are creating? • What transformative actions can parliaments take to safeguard advancements in gender equality? • How can parliaments be gender-sensitive institutions able to push back against the pushback? • What partnerships are needed to address the rollback on women's rights? Intervention:
17:00–17:30	Wrap up and concluding remarks

B. Jalannya Persidangan

1. Opening Ceremony

- a. Event parlemen yang dihelat IPU bekerja sama dengan UN Women dengan tema “Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality” dibuka tepat pukul 10 waktu New York, pada tanggal 11 Maret 2025.
- b. The Permanent Observer of the Inter-Parliamentary Union (IPU) to the United Nations Paddy Torsney membuka acara dan mempersilakan **Ms. Cynthia López Castro, Senator of Mexico and President of the IPU Bureau of Women Parliamentarians** memberikan sambutan.
- c. Dalam sambutannya, Cynthia menyoroti (1) pentingnya memastikan perempuan mendapatkan ruang yang setara dalam kehidupan politik dan sosial, serta mendemonstrasikan bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci untuk kemajuan masyarakat; (2) Ia juga membicarakan perlunya menghapuskan hambatan struktural yang menghambat partisipasi perempuan, melalui perubahan mendasar dalam kebijakan publik untuk mengatasi diskriminasi dan bias gender. Selain itu, di akhir sambutannya, (3) ia menekankan pentingnya kerja sama antara pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas untuk menciptakan solusi kebijakan yang inovatif dan tepat guna dalam mendukung pemberdayaan perempuan.



The 69th Session of the Commission on the Status of Women. Dok. BKSAP



Presiden IPU Tulia Ackson menyampaikan sambutan pada sidang 69th Session of The Commission on the Status of Women. Dok. BKSAP

- d. **Presiden IPU Tulia Ackson yang juga Ketua Parlemen Tanzania** menyampaikan sambutan. Beberapa poin penting sambutannya adalah (1) parlemen memiliki peranan penting dalam mempertahankan demokrasi dengan memastikan keterwakilan yang luas dan mendukung partisipasi aktif setiap warga negara; (2) ia mengajak parlemen untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan kelompok hidup minoritas dalam proses pengambilan keputusan guna menciptakan kebijakan lebih inklusif; (3) ia juga menekankan perlunya kerja sama antar parlemennya di tingkat global untuk menyusun dan menerapkan kebijakan yang responsif terhadap tantangan zaman, termasuk dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
- e. **Ms. Nyaradzayi Gumbonzvanda, Deputy Executive Director for Normative Support, UN System Coordination and Programme Results, UN Women** menyampaikan beberapa hal penting, di antaranya: (1) perempuan harus berperan secara strategis dalam pengambilan keputusan global untuk memastikan kebijakan yang lebih adil dan inklusif. (2) ia juga menjelaskan tantangan nyata yang dihadapi perempuan—termasuk kekerasan dan diskriminasi—serta mengajak para pemimpin global untuk menerapkan kebijakan yang efektif dalam perlindungan hak-hak perempuan; dan (3) ia menggarisbawahi bahwa akses yang merata terhadap pendidikan dan layanan kesehatan merupakan dasar pemberdayaan perempuan serta komponen penting bagi pembangunan berkelanjutan; (4) ia mengaitkan upaya pemberdayaan perempuan dengan terciptanya perdamaian dan

stabilitas global, di mana peningkatan peran perempuan dinilai esensial untuk kemajuan sosial dan ekonomi.

- f. Jika dirangkum, ketiga pembicara di atas menggarisbawahi tekad untuk mendorong transformasi yang mendasar dalam tata kelola publik, dengan menempatkan prinsip kesetaraan gender, partisipasi aktif, dan kerja sama lintas negara sebagai kunci untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

2. **Sesi I Women's political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity**

Sesi pertama meninjau data dan sumber daya terbaru tentang perempuan dalam politik, termasuk laporan IPU "Women in Parliament 2024" dan peta "Women in Politics 2025" hasil kolaborasi IPU-UN Women. Sesi ini memberikan ruang untuk mengevaluasi kondisi global representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik selama 30 tahun terakhir, menyoroti kemajuan, tantangan yang masih ada, serta pelajaran yang dapat diambil. Peserta membahas hasil pemilu tahun 2024 dan dampaknya terhadap representasi politik perempuan, memberikan wawasan tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.



Para panelis sesi I dengan tema *Women's political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity*. Dok. BKSAP

Sesi ini menampilkan empat pembicara yakni **Ms. Cynthia Lopez Castro, Ms. Nafeesa Shah, Ms. Lashell Adderley, dan Ms. Kafilat Ogbara.** Berikut adalah poin-poin penting yang diangkat para pembicara:

a. Ms. Cynthia López Castro (Senator dan President of the IPU Bureau of Women Parliamentarians)

- Dalam paparannya, Cynthia menekankan pentingnya meningkatkan keikutsertaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat kebijakan nasional maupun internasional, agar perspektif dan kebutuhan perempuan mendapatkan tempat yang setara.
- Cynthia juga mengusulkan agar reformasi kebijakan publik selalu mengintegrasikan pendekatan gender, sehingga setiap kebijakan mampu merespons tantangan kesetaraan dan keadilan sosial secara menyeluruh.
- Cynthia menekankan perlunya sinergi antara pemerintah, parlemen, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung pemberdayaan perempuan melalui reformasi dan inovasi kebijakan.

b. Ms. Nafeesa Shah (Chairperson of National Assembly of Pakistan dan Special Committee on Gender Mainstreaming)

- Nafeesa memulai dengan perlunya pendekatan interseksional dalam kebijakan. Ia menyoroti bahwa kebijakan harus dirancang dengan mempertimbangkan berbagai dimensi identitas, seperti gender, ras, dan kelas, untuk mengatasi ketidaksetaraan yang terjadi secara bersamaan pada kelompok-kelompok rentan.
- Nafeesa menggarisbawahi perlunya perubahan mendasar dalam struktur dan sistem pemerintahan untuk menghilangkan hambatan yang mengunci potensi partisipasi penuh perempuan dan kelompok minoritas.
- Ia melanjutkan paparan mengenai pendidikan sebagai katalis perubahan dengan menekankan peran vital pendidikan dan peningkatan kesadaran sebagai alat untuk meruntuhkan stereotip gender serta membuka akses lebih luas bagi perempuan dalam berbagai sektor kehidupan.

c. Ms. Lashell Adderley (President of the Senate the Bahamas)

- Lashell memulai paparan mengenai pentingnya kepemimpinan perempuan sebagai kunci transformasi. Ia berangkat dari keyakinan bahwa kehadiran perempuan dalam posisi

kepemimpinan tidak hanya memberikan representasi, tetapi juga mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan adil, mencerminkan pengalaman serta aspirasi seluruh masyarakat.

- Ia melanjutkan dengan membedah berbagai tantangan struktural dan kultural yang sering kali menghalangi perempuan untuk mencapai potensi kepemimpinan mereka, serta mengusulkan strategi konkret untuk mengurangi hambatan tersebut.



President of the Senate the Bahamas Lashell Adderley menjadi panelis di sesi I The 69th Session Of The Commission On The Status Of Women. Dok. BKSAP

- Di akhir paparan, ia menekankan pentingnya membangun dan memperkuat jaringan serta aliansi antar perempuan di berbagai bidang, guna menciptakan dukungan kolektif yang dapat menghasilkan perubahan sistemik.

d. Ms. Kafilat Ogbara (Member of Parliament Nigeria)

- Sebagai pendahuluan, Kafilat mengemukakan bahwa perumusan kebijakan harus mencakup berbagai perspektif dan data yang mengindikasikan kebutuhan nyata perempuan dan kelompok rentan, sehingga hasilnya bisa lebih adil dan tepat sasaran.
- Ia menyoroti keharusan untuk mengadopsi metode inovatif, termasuk penggunaan data empiris, dalam merancang kebijakan

agar solusi yang dihasilkan benar-benar responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi saat ini.

- Ia mengajak terbentuknya kolaborasi dan pertukaran praktik terbaik antar negara dan lembaga internasional sebagai upaya bersama dalam mentransformasikan lanskap pemberdayaan dan kesetaraan gender di tingkat global.
- Jika dirangkai, setiap pembicara menekankan pentingnya pendekatan inklusif, reformasi struktural, dan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi untuk mewujudkan kebijakan yang mampu merespons tuntutan zaman dan menjawab tantangan kesetaraan, khususnya dalam konteks pemberdayaan perempuan di berbagai lingkup kehidupan.



Peta women in politic 2025. Dok. BKSAP

Sesi I dilanjutkan dengan penyampaian intervensi dari para peserta yang hadir. Berikut adalah catatan penting dari delegasi parlemen yang memberikan intervensi dalam Sesi I.

Delegasi Chile

- Delegasi Chile menyampaikan pentingnya negara mengidentifikasi dan menginisiasi program yang dibutuhkan anak dan perempuan untuk menjamin keterwakilan perempuan di politik.
- Parlemen dapat mewujudkan sistem legislasi preventif untuk mendukung kesetaraan gender.

Delegasi Meksiko

- Perlu mengubah peraturan pemilihan umum dengan menerapkan kuota gender 50% bagi perempuan
- Parlemen perlu menerapkan anggaran yang lebih besar bagi program kesetaraan gender di ruang publik.



Delegasi Parlemen Meksiko. Dok. BKSAP

Delegasi Turkiye

- Delegasi Turkiye menekankan pentingnya kebijakan dibuat inklusif bagi perempuan dan laki-laki sehingga tidak ada diskriminasi berbasis gender.
- Kesetaraan gender harus dibangun melalui peningkatan kesadaran di semua pemangku kepentingan.

- Parlemen perlu menghubungkan sumber daya yang ada sehingga dapat menginisiasi kebijakan kesetaraan gender.

Delegasi Prancis

- Delegasi Prancis menyebutkan pentingnya untuk menerapkan gender parity dalam proyek pembangunan nasional masing-masing negara. Tujuan dari gender paritas perlu ditetapkan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana semua orang dapat hidup dengan bebas dan penuh potensi, tanpa adanya hambatan atau diskriminasi karena jenis kelamin.
- Diplomasi parlemen perlu ditingkatkan menjadi solidaritas parlemen global dalam mengembangkan strategi feminis dalam meningkatkan proporsi perempuan di tingkat pengambilan kebijakan.

Delegasi Namibia

- Delegasi Namibia menyampaikan perlunya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik.
- Perlunya keterlibatan penuh anak muda dalam politik
- Negara perlu aksi afirmasi bagi perempuan di era digital.
- Pentingnya untuk menurunkan kekerasan terhadap perempuan

Delegasi Serbia

- Delegasi Serbia menyampaikan bahwa kesetaraan gender perlu dimasukkan secara tertulis dalam konstitusi dan aturan perundang-undangan lainnya.
- Parlemen perlu memastikan bahwa peraturan yang dibuat menjamin inklusivitas politik.
- Parlemen perlu menampung solidaritas perempuan untuk terus menyuarakan perempuan di ruang publik.

Delegasi Parlemen Kongo

- Delegasi Kongo menyampaikan bahwa perempuan masih mengalami kekerasan di ruang privat dan ruang publik di negaranya.
- Negara perlu mendukung penuh otonomi perempuan di ruang publik
- Perempuan perlu berjejaring menjalin solidaritas dalam memperjuangkan nasib perempuan di ruang publik.

Delegasi Korea Selatan

- Delegasi Korea Selatan menyampaikan bahwa sistem sekarang dibuat dengan paradigma laki-laki. Oleh karena itu sistem harus diubah dengan memikirkan perspektif perempuan.



- Perlu solidaritas mendukung agenda perjuangan perempuan di ruang publik.
- BPFA dalam 30 tahun hanya menghasilkan kesuksesan implementasi di lapangan sebesar 20 hingga 27 persen.
- Parlemen harus di depan dalam memberikan kerangka hukum bagi perjuangan perempuan.

Delegasi Belgia

- Delegasi Belgia menyampaikan bahwa kuota gender yang diterapkan dalam kurun 1995-2025 berhasil meningkatkan 12 hingga 20 persen keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik.
- Dukungan dan bantuan harus ditargetkan pada perempuan dengan sangat fokus.
- Memanfaatkan media untuk memastikan pemilihan yang adil bagi perempuan.
- Perlu menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan dari kebencian dan pelecehan dalam bentuk apa pun.

Delegasi Parlemen Kanada

- Delegasi Kanada menyampaikan perlunya diversifikasi dalam mewujudkan gender parity
- Perlunya melibatkan lebih banyak perempuan dalam kepemimpinan politik.



Delegasi Parlemen Kanada menyampaikan intervensi di sesi I. Dok. BKSAP

Delegasi Parlemen UK

- UK telah mencapai 38 persen perempuan di parlemen
- Pentingnya menaikkan anggaran gender di ruang publik

Delegasi Parlemen Nigeria

- Seorang anggota parlemen Nigeria menyampaikan kisahnya ketika mengajukan petisi pelecehan seksual yang mengakibatkan dirinya ditangguhkan di parlemen selama enam bulan tanpa hak yang memadai seperti jaminan keamanan dan gaji
- Perempuan di Nigeria mengalami penindasan sistemik, kekerasan berbasis gender, dan korban politik.
- Perlu kerja sama global dalam melawan intimidasi politik terhadap perempuan

Delegasi Parlemen Maroko

- Perlu meningkatkan kualitas legislasi dalam melindungi hak-hak perempuan di ruang publik.
- Perlunya meningkatkan kesadaran publik tentang kesetaraan gender.

3. Sesi II: Pushing back against the pushback

Sesi II membahas tema Melawan Reaksi Balik. Sesi ini membahas hambatan dan bahaya dari reaksi balik yang menghambat kemajuan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dengan menekankan tindakan parlemen yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Peserta akan mengidentifikasi bentuk reaksi balik, kekuatan pendukungnya, serta kerusakan yang ditimbulkan terhadap upaya kesetaraan gender. Sesi ini juga mengeksplorasi solusi konkret untuk membalikkan reaksi balik dan mempertahankan momentum menuju kesetaraan gender, termasuk melalui kemitraan global untuk mendukung implementasi agenda BPfA dan SDGs.

Sesi II menyajikan paparan enam pembicara. Berikut adalah ringkasan poin-poin utama yang disampaikan oleh para pembicara dalam sesi tersebut:

a. Ms. Julia Braunmiller (Senior Private Sector Development Specialist, Women, Business and the Law Project, World Bank)

- Julia berbicara mengenai perlunya reformasi kebijakan keluarga dengan menyoroti pentingnya merombak dan memodernisasi kebijakan keluarga agar mencerminkan berbagai bentuk keluarga dan pengaturan perawatan di era modern.

- Ia menjelaskan bahwa pekerjaan perawatan—baik yang dibayar maupun tidak dibayar—seringkali tidak dihargai, meskipun sebagian besar dilakukan oleh perempuan. Ia mendorong agar peran perawatan diintegrasikan dengan perencanaan sosial dan ekonomi.
 - Terakhir, ia menekankan perlunya kebijakan yang mengutamakan hak asasi manusia dan keadilan sosial, sehingga setiap anggota keluarga mendapatkan perlindungan dan dukungan yang setara.
- b. **Ms. Antonia Kirkland (Global Lead, Legal Equality and Access to Justice, Equality Now)**
- Antonia menegaskan bahwa kebijakan keluarga harus mempertimbangkan persimpangan ketidaksetaraan—seperti ras, kelas sosial, dan identitas gender—untuk menghindari solusi yang bersifat “satu ukuran untuk semua.”
 - Ia mengajak pembuat kebijakan untuk mengatasi struktur masyarakat yang mendiskriminasi kelompok keluarga tertentu, melalui reformasi di bidang ketenagakerjaan, perumahan, dan kesehatan.
 - Ia juga mengusulkan agar masyarakat secara aktif dilibatkan dalam perumusan kebijakan, sehingga reformasi lebih mencerminkan kebutuhan dan pengalaman nyata dari berbagai kelompok keluarga.



Antonia Kirkland (Global Lead, Legal Equality and Access to Justice, Equality Now) menjadi panelis di sesi II dengan tema Pushing back against the pushback. Dok. BKSAP

c. **Mr. Seedy S.K. Njie (Deputy Speaker of the National Assembly Bahama)**

- Seedy berargumen untuk menempatkan kebijakan keluarga dalam kerangka hak asasi manusia, memastikan bahwa setiap kebijakan tidak bersifat diskriminatif serta menjunjung tinggi martabat, kesetaraan, dan keadilan bagi semua jenis keluarga.
- Ia menekankan pentingnya masukan lokal dan advokasi komunitas (*grassroots*) dalam merancang serta mengimplementasikan reformasi kebijakan keluarga.
- Ia menyoroti disparitas dalam sistem dukungan sosial secara global, terutama di wilayah-wilayah di mana kebijakan tradisional kurang mampu melindungi populasi yang rentan.

d. **Ms. Petra Bayr (Member of Parliament Austria)**

- Petra mencoba memulai paparan dengan implikasi ekonomi yang timbul sebagai akibat kebijakan yang diambil. Ia menggambarkan manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan dari investasi pada keluarga, seperti peningkatan partisipasi dalam angkatan kerja dan pengurangan ketergantungan pada layanan darurat.
- Ia pun mengadvokasi pengembangan sistem perlindungan sosial yang kuat dan inklusif, tidak hanya untuk keluarga inti tetapi juga untuk jaringan kekerabatan yang lebih luas dan pengaturan keluarga non-tradisional.
- Ia menunjukkan bahwa reformasi kebijakan keluarga sebaiknya menjadi bagian dari agenda reformasi sosial-ekonomi yang lebih luas, dan harus terhubung dengan sektor pendidikan, tenaga kerja, dan kesehatan.

e. **Mr. Mohamed Farid (Senator Egypt)**

- Farid memulai paparan dengan mengaitkan kebijakan keluarga dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, dengan menunjukkan bahwa keluarga yang mendapat dukungan akan menciptakan masyarakat yang lebih tangguh dan adil.
- Ia pun mendesak agar pembuat kebijakan merancang undang-undang yang mengakui keberagaman bentuk keluarga dan adaptif terhadap perubahan dalam struktur pengasuhan dan pembentukan rumah tangga.
- Ia juga menyarankan agar ditetapkan metrik yang jelas untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan keluarga dalam mempromosikan inklusi sosial serta mengurangi ketidaksetaraan.

f. **Mr. Gary Barker (President dan CEO Equimundo)**

- Gary mendorong perpindahan dari pendekatan tradisional menuju kebijakan yang inovatif dan visioner, lebih mencerminkan realitas kehidupan keluarga modern.
- ia mengimbau agar pemerintah dan lembaga menggunakan data dan riset yang komprehensif dalam merancang kebijakan keluarga, agar reformasi benar-benar merespons kebutuhan saat ini.
- Dalam kesimpulan ia menyerukan perlunya kemitraan dan kolaborasi multipihak. Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor—antara pemerintah, masyarakat sipil, dan sektor swasta—untuk menciptakan kerangka kerja kebijakan keluarga yang berkelanjutan dan komprehensif.
- Secara umum, para pembicara menyampaikan visi yang menyeluruh dengan mengintegrasikan reformasi kebijakan keluarga, kesetaraan gender, hak asasi manusia, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Visi ini bertujuan untuk mengakui dan mendukung keberagaman bentuk keluarga serta menghadapi tantangan ketidaksetaraan di berbagai lapisan masyarakat.



Para panelis sesi II foto bersama Presiden IPU Tulia Ackson. Dok. BKSAP

Sesi II dilanjutkan dengan penyampaian intervensi dari para peserta yang hadir. Berikut adalah catatan penting dari delegasi parlemen yang memberikan intervensi dalam Sesi II.

Delegasi Parlemen Mali

- Mali telah menerapkan kuota gender untuk memastikan keterwakilan perempuan di parlemen
- Perempuan di Mali dan negara Afrika lainnya membutuhkan dukungan akses perempuan ke pangan, kesehatan, dan pendidikan.
- Mali dan negara-negara Afrika lainnya berjuang untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan di ruang publik.
- Mali telah menerapkan mekanisme untuk terus mendorong perempuan aktif dan terlibat dalam politik.

Delegasi Yunani

- Kita harus memastikan situasi demokrasi di masing-masing negara untuk mengukur partisipasi perempuan dalam politik.
- Tidak akan ada partisipasi perempuan tanpa demokrasi yang baik. Kita mesti mendidik dan meningkatkan kesadaran tentang demokrasi.
- Partisipasi perempuan akan meningkat seiring dengan tingginya tingkat pendidikan di suatu negara.
- Yunani komitmen dalam mendukung kesetaraan gender, namun yang lebih penting adalah merubah cara pikir tradisional politikus laki-laki untuk mengakomodasi kepentingan perempuan.

Delegasi Parlemen Lithuania

- Reaksi balik yang melawan perjuangan kesetaraan gender berawal dari kondisi demokrasi yang memburuk di seluruh dunia.
- Propaganda dari rezim yang berkuasa juga berdampak terhadap demokrasi seperti invasi Rusia atas Ukraina.
- Sabotase terhadap demokrasi memunculkan menurunnya partisipasi perempuan dalam kepemimpinan politik.
- Lithuania dapat meningkatkan peran perempuan dalam politik karena amendemen konstitusi yang memungkinkan perempuan menjadi presiden, PM, dan menteri pertahanan.

Delegasi Meksiko

- Kebijakan tentang kesetaraan gender mesti dilihat dari perspektif keluarga yang memungkinkan anak laki-laki dan perempuan mempunyai dasar yang sama dalam melihat kesetaraan gender.

- Meksiko mengalami tantangan dalam menerapkan anggaran yang memadai dalam kesetaraan gender.
- Investasi tentang anak akan menciptakan generasi yang memandang kesetaraan lebih baik di masa mendatang.

Delegasi Chile

- Chile menghadapi tantangan stereotipe gender di lapangan. Amendemen konstitusi dan implementasi regulasi yang pas memungkinkan kenaikan jumlah perempuan dan senat maupun di Camara de diputados sebesar 24 persen.
- Banyak dari gubernur yang terpilih adalah perempuan.



Delegasi parlemen Chile. Dok. BKSAP

Delegasi Maroko

- Maroko telah mencapai perubahan signifikan penting dalam memajukan perempuan di bidang politik berkat jasa Raja Mohamed VI.
- Banyak UU maupun regulasi yang memungkinkan perempuan mengakses jalur politik untuk mencapai kesetaraan gender. Hal ini berlaku hingga tingkat pemerintahan kota.
- Maroko terus memerangi gender stereotipe dalam politik dengan mengutamakan nilai-nilai Maroko.

Delegasi Parlemen Korea Selatan

- Kesetaraan gender adalah HAM paling mendasar. Dalam kenyataan, implementasi di lapangan tidak selalu mulus.
- Perlu media sosial untuk memerangi misinformasi dan hoaks tentang peran perempuan dalam politik.
- Pemerintah Korea bersama Pemerintah Daerah serta komunitas bekerja sama erat untuk terus menggaungkan kesadaran masyarakat mengenai peran penting perempuan di politik.
- Korea mempunyai dana alokasi khusus untuk pengarusutamaan gender di ruang publik. Perlu kerja sama global untuk mencapai target keterwakilan perempuan di politik dan melawan arus balik perlawanan terhadap ide kesetaraan gender.

Delegasi Parlemen Turkiye

- Peran parlemen Turkiye amat strategis dalam mendukung kebijakan negara yang inklusif dan berwawasan gender.
- Parlemen Turkiye selama 20 tahun telah berperan menerapkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk memastikan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan serta memerangi kekerasan berbasis gender.
- Parlemen Turkiye telah berperan penting ikut ambil bagian dalam menggugah kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender.
- Turkiye menerapkan dokumen strategi dan aksi nyata 2024-2028 agar perempuan mendapat hak-hak dasarnya.

Delegasi Parlemen Guatemala

- Di Guatemala, Wakil Presiden Perempuan, gender parity telah tercapai di kabinet pemerintahan dan pemerintah daerah. Namun demikian, perwakilan perempuan di parlemen kurang dari 20 persen.
- Machismo dan kolonialisme masih menjangkiti Guatemala sehingga pola pikir yang meminggirkan peran perempuan di ruang publik masih membekas di kalangan rakyat Guatemala.
- Penting untuk menerapkan CEDAW dalam kerangka hukum nasional.

Delegasi Parlemen Myanmar

- Kudeta militer di Myanmar pada 2021 berdampak pada pembungkaman kepemimpinan perempuan di Myanmar, termasuk menekan partisipasi perempuan di politik.
- Isu perempuan kini didominasi oleh masalah keselamatan perempuan Myanmar.



- Perlu kemitraan global serta kerja sama antar parlemen untuk mengatasi kesenjangan gender yang makin melebar di Myanmar.
- Mendesak UN Women, IPU, komunitas internasional untuk mendesak junta militer mengakhiri represi terhadap perempuan di politik.

Delegasi Parlemen Perancis

- Kita membutuhkan solidaritas global dalam memerangi stereotipe gender. Solidaritas global dapat kita bangun melalui diplomasi parlemen.
- Kita perlu membangun bersama ide diplomasi feminis dalam upaya memperjuangkan kebebasan perempuan dan memerangi ketidaksetaraan gender.
- Kita perlu memikirkan bagaimana menyelamatkan perempuan dalam wilayah konflik sebagaimana perempuan dalam domestik rumah tangga.

Delegasi Parlemen Botsawa

- Sejak 2024 Bostwana telah melakukan reformasi hukum dan kebijakan untuk memajukan hak-hak perempuan dan melindungi hak-hak perempuan terutama kesetaraan pembayaran upah antara laki-laki dan perempuan, hak-hak reproduksi, kekerasan berbasis gender serta hak-hak ekonomi lainnya.

Delegasi Parlemen Ukraina

- Ketidaksetaraan gender membuat mundur kondisi demokrasi yang mengutamakan dan mengedepankan HAM.
- Tiga area kritis dalam kesetaraan gender: (1) politik representasi perempuan; (2) keadilan ekonomi; (3) kekerasan berbasis gender.
- Misinformasi dan media sosial mendiskreditkan perempuan, melemahnya dukungan bagi kewirausahaan perempuan, dan masalah keamanan menyebabkan perempuan menjadi golongan rentan.
- 26 persen perempuan duduk di Parlemen Ukraina, 50.000 perempuan menjadi tentara Ukraina, serta 5.000 perempuan Ukraina berada di arena terdepan perang.
- Beberapa hal perlu ditekankan: kesetaraan gender harus menjadi norma, perlu mentoring untuk mendukung perempuan, serta meringgirkan pola pikir seksisme dalam setiap pengambilan kebijakan.
- Parlemen tidak hanya membuat atau meloloskan UU namun membuka debat publik untuk mencapai partisipasi publik yang bermakna dalam setiap pengambilan kebijakan.

Delegasi Parlemen Guinea

- Guinea memperluas kampanye publik untuk menyadarkan pentingnya kesetaraan gender di kalangan akar rumput.
- Laki-laki perlu bergabung dalam upaya memerangi ketidaksetaraan gender.
- Guinea sekarang memiliki kuota gender sebesar 31 persen di kursi parlemen. Guinea hanya memiliki kuota gender sebesar 18-20 persen pada periode sebelumnya.
- Perlu memperjuangkan gender parity sebesar 50-50%.



Anggota Parlemen Guinea menyampaikan pandangan si Sesi II. Dok. BKSAP

Delegasi Parlemen Uruguay

- Perlu terus menyuarakan hak-hak perempuan.
- Parity hanya representasi, yang diperlukan distribusi kekuasaan yang adil di semua level kepemimpinan.
- Perlu politik kepedulian untuk memperjuangkan hak-hak perempuan di ruang publik khususnya politik.

Delegasi Parlemen Kanada

- Sejak 2018, Kanada serius memperhatikan dan memperjuangkan hak-hak perempuan penduduk asli untuk mencapai hak-hak dasar.
- Perempuan penduduk asli Kanada telah lama tidak terjangkau dalam sistem kesehatan serta sistem pendidikan. Itulah yang membuat hambatan mereka sedikit terwakili dalam politik.

4. PARTISIPASI DELEGASI BKSAP DPR RI

Delegasi BKSAP DPR RI menyampaikan intervensi dalam dua sesi yang berbeda.

a. Sesi pertama Women's political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity

Dalam sesi pertama, peserta meninjau data dan sumber daya terbaru tentang perempuan dalam politik, termasuk laporan IPU "Women in Parliament 2024" dan peta "Women in Politics 2025" hasil kolaborasi IPU-UN Women. Sesi ini memberikan ruang untuk mengevaluasi kondisi global representasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik selama 30 tahun terakhir, menyoroti kemajuan, tantangan yang masih ada, serta pelajaran yang dapat diambil. Peserta membahas hasil pemilu tahun 2024 dan dampaknya terhadap representasi politik perempuan, memberikan wawasan tentang partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan.



Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri sidang 69th Session of The Commission on The Status of Women. Dok. BKSAP

Pertanyaan Utama yang dibahas

- 1) Kemajuan apa yang telah dicapai dalam meningkatkan representasi perempuan di parlemen dan kepemimpinan politik secara global selama 30 tahun terakhir?
- 2) Apa pengamatan utama dari hasil pemilu 2024 terkait partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan?
- 3) Apa hambatan yang menghalangi kemajuan lebih besar, dan bagaimana cara mengatasinya?
- 4) Pelajaran apa yang dapat diambil dari negara-negara yang menunjukkan kemajuan signifikan menuju kesetaraan gender dalam politik, dan bagaimana keberhasilan ini dapat menginspirasi upaya global?
- 5) Bagaimana kita dapat menginspirasi dan mendukung generasi pemimpin perempuan berikutnya untuk mengambil peran politik?

Poin-poin ini mencerminkan fokus sesi dalam mengevaluasi kondisi politik perempuan secara global dan merancang strategi untuk mendukung kesetaraan gender di masa depan.



Delegasi BKSAP DPR RI saat berada di ruang sidang di Markas Besar PBB, New York, Amerika Serikat. Dok. BKSAP

Dalam sesi pertama, delegasi BKSAP DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menyampaikan intervensi. Berikut adalah poin penting yang disampaikan anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra:

- 1) Kesetaraan gender bukan hanya merupakan isu perempuan semata akan tetapi isu kemanusiaan. Kita membutuhkan laki-laki untuk juga menerapkan gender equality di semua bidang. Dirinya mengapresiasi kehadiran anggota parlemen laki-laki di forum ini untuk mendukung perjuangan kesetaraan gender.
- 2) Indonesia dengan bangga memperkenalkan anggota parlemen perempuan muda berusia 26 tahun dari PDIP yang hadir di tempat ini. Saraswati Djojohadikusumo juga bangga memperkenalkan anggota parlemen termuda dan juga perempuan dari Partai Gerindra.
- 3) Pemilu Indonesia menerapkan sistem proporsional terbuka tanpa spending cap dan menjadi mahal ongkos politiknya untuk memenuhi keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen.
- 4) Mustahil pemenuhan keterwakilan perempuan di parlemen tanpa perubahan mendasar dalam tatanan yang dipenuhi patriarki.
- 5) Perempuan perlu kemandirian finansial untuk memenuhi keterwakilan di parlemen
- 6) Parlemen Indonesia sendiri sudah menetapkan beberapa UU yang berdampak pada keberpihakan pada perempuan dan memastikan perjuangan perempuan mendapat dukungan negara. Beberapa UU tersebut adalah: UU TPKS, perdagangan manusia, uu perlindungan anak, dan terbaru uu KIA.
- 7) Free and meal program yang digagas Pemerintahan Presiden Prabowo guna mendukung generasi masa depan.

b. **Sesi II Pushing back against the pushback**

Sesi II membahas tema Melawan Reaksi Balik. Sesi ini membahas hambatan dan bahaya dari reaksi balik yang menghambat kemajuan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan, dengan menekankan tindakan parlemen yang diperlukan untuk mengatasi tantangan tersebut. Peserta akan mengidentifikasi bentuk reaksi balik, kekuatan pendukungnya, serta kerusakan yang ditimbulkan terhadap upaya kesetaraan gender. Sesi ini juga mengeksplorasi solusi konkret untuk membalikkan reaksi balik dan mempertahankan momentum menuju kesetaraan gender, termasuk melalui kemitraan global untuk mendukung implementasi agenda BPfA dan SDGs.

Pertanyaan Utama yang Dibahas:

- 1) Di area mana reaksi balik paling sering terjadi, dan kerusakan apa yang ditimbulkannya?

- 2) Tindakan transformatif apa yang dapat diambil oleh parlemen untuk melindungi kemajuan dalam kesetaraan gender?
- 3) Bagaimana parlemen dapat menjadi institusi yang sensitif terhadap gender dan mampu melawan reaksi balik?
- 4) Kemitraan apa yang diperlukan untuk mengatasi kemunduran dalam hak-hak perempuan?

Poin-poin ini mencerminkan fokus sesi dalam mengidentifikasi tantangan dan merancang strategi untuk melawan reaksi balik terhadap kesetaraan gender.



Anggota BKSAP DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri Haprani. Dok. BKSAP

Dalam sesi II ini, delegasi BKSAP DPR RI Diah Pikatan Orissa Putri menyampaikan intervensi. Berikut adalah poin penting intervensi yang disampaikan anggota BKSAP DPR RI dari Fraksi PDIP:

- 1) Tema even parlemen CSW ke-69 mengingatkan pada feminis Indonesia Raden Ajeng Kartini. Di tahun 1905, Kartini mengatakan "jangan lagi ada zaman kegelapan di mana perempuan diperlakukan semena-mena"
- 2) 100 tahun setelah Kartini, 30 tahun BPFA, dan satu dekade SDGs, ketidakadilan gender tetap ada.
- 3) Aksi afirmatif harus kita kedepankan untuk mengatasi tantangan sistemik yang meminggirkan peran perempuan akibat struktur patriarki.

- 4) Saya meminta semua anggota parlemen dunia untuk memaksimalkan fungsi parlemen di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk mencapai SDGs khususnya SDG5 tentang kesetaraan gender.
- 5) DPR RI mengambil 3 langkah transformatif guna mencapai kesetaraan gender dan perlindungan thdp hak-hak perempuan. Pertama, pembuatan dan penguatan uu yang melindungi dan mengedepankan kesetaraan gender serta memastikan kuota keterwakilan 30% perempuan calon anggota legislatif di tingkat partai. Kedua, mengalokasikan anggaran untuk mengedepankan kebijakan sensitif gender guna memastikan kebijakan negara inklusif dan memperhatikan kebutuhan unik perempuan. Ketiga, membentuk Kaukus Perempuan Parlemen untuk mendukung kepemimpinan perempuan dan memfasilitasi partisipasi perempuan di bidang politik dan pengambilan kebijakan.
- 6) Dalam mengatasi kemunduran dan bahaya, DPR RI berkomitmen melawan reaksi balik dan berupaya mencapai kesetaraan gender serta melindungi hak-hak perempuan seperti tersurat dalam SDG5. Forum ini mesti kita gunakan untuk membangkitkan aksi nyata mewujudkan masyarakat adil dan inklusif.
- 7) Kesetaraan gender membutuhkan laki-laki, dan laki-laki membutuhkan kesetaraan gender.



III. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Event parlemen Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) yang berlangsung pada tanggal 11 Maret 2025 di Markas Besar PBB, New York-Amerika Serikat berjalan dengan lancar dan sukses.
2. Acara CSW69 menandai peringatan 30 tahun Deklarasi Beijing dan Platform Aksi (BPFA), dengan menegaskan pentingnya meneruskan dan mengembangkan warisan kesetaraan gender yang telah dicapai selama tiga dekade terakhir.
3. Acara sesi parlemen ini menyoroti peran sentral parlemen dalam memajukan kesetaraan gender. Parlemen didorong untuk mengambil peran aktif dalam mengembangkan kebijakan dan strategi legislasi yang mendukung hak-hak perempuan, sekaligus menjadi garda terdepan dalam mengimplementasikan agenda kesetaraan gender.
4. Salah satu tema utama adalah bagaimana menghadapi dan melawan reaksi balik atau antisipasi terhadap upaya kesetaraan gender. Diskusi menekankan perlunya respon strategis agar kemajuan yang telah dicapai tidak terganggu oleh dinamika politik atau sosial yang regresif.
5. Delegasi BKSAP DPR RI menghadiri sesi pembukaan, Sesi I, dan Sesi II sesuai agenda dan program yang telah ditetapkan dan telah berpartisipasi aktif dengan memberikan intervensi dalam Sesi I maupun Sesi II.

B. Saran

1. Hasil-hasil Sidang Event parlemen Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) perlu disampaikan kepada Komisi I, VIII, dan XI dan diharapkan

hasil-hasil Sidang dapat menjadi bahan masukan ketika melakukan Rapat Kerja/ Rapat Dengar Pendapat dengan mitra kerja atau saat pembahasan RUU terkait dengan penguatan peran perempuan .

2. Hasil-hasil Event parlemen Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) ini perlu didiseminasikan lebih lanjut dengan Kementerian terkait seperti Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Luar Negeri, maupun Bappenas.
3. Pengiriman delegasi ke Komisi Status Perempuan (CSW) ke depan dapat melakukan FGD dengan mengundang instansi terkait sesuai tema sidang. Hal ini bertujuan untuk memperkaya substansi materi.
4. Pengiriman delegasi ke forum-forum internasional yang membahas kesetaraan gender lainnya perlu diintensifkan guna menjalin kerja sama global dan bertukar pengalaman, strategi, dan praktik terbaik dalam mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender. Kerja sama global ini diharapkan dapat memperkuat jaringan dan mempercepat pencapaian target kesetaraan gender secara transnasional.



IV. PENUTUP

A. Anggaran

Rangkaian kegiatan dan partisipasi Delegasi BKSAP DPR RI pada event parlemen Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) yang berlangsung pada tanggal 11 Maret 2025 di Markas Besar PBB, New York– Amerika Serikat menggunakan mata anggaran MAK: 2025.001030.CF.5805.AEC.001.C.524211 sebesar Rp1.224.775.600.00,- (Satu miliar dua ratus dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).

B. Keterangan dan Lampiran

1. Lampiran Intervensi
2. Foto Dokumentasi ([link](#))
3. Publikasi Media
 - [Tingkatkan Kepemimpinan Perempuan untuk Mencapai SDGs 2030](#)
 - [DPR Serukan Kesetaraan Gender](#)
 - [Rahayu Saraswati: Kesetaraan Gender adalah Isu Kemanusiaan](#)
 - [Ikuti Sidang Komite Status Perempuan di Markas PBB, Pinka Haprani Singgung Perjuangan RA Kartini](#)
 - [Gapai Kesetaraan Gender, Pinka: Maksimalkan Fungsi Parlemen](#)
 - [BKSAP: Perempuan Berdaya, Negara akan Kuat](#)

C. Ucapan Terima Kasih

Atas nama Delegasi BKSAP DPR RI, kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan untuk mengikuti pelaksanaan event parlemen

Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) yang berlangsung pada tanggal 11 Maret 2025 di Markas Besar PBB, New York–Amerika Serikat.

Semoga peran BKSAP DPR RI sebagai peserta dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan dan kegiatan-kegiatan IPU dan PBB di masa yang akan datang.

D. Kata Penutup

Demikian pokok-pokok laporan Delegasi BKSAP DPR RI pada event parlemen Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) pada tanggal 11 Maret 2025 di Markas Besar PBB, New York Amerika Serikat. Semoga bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, April 2025
a.n. Delegasi BKSAP DPR-RI,

Irine Yusiana Roba Putri

A-258



LAMPIRAN



Inter-Parliamentary Union

For democracy. For everyone.

Office of the Secretary General

T +41 22 919 41 50

F +41 22 919 41 60

E postbox@ipu.org

www.ipu.org

Chemin du Pommier 5

Case postale 330

1218 Le Grand-Saconnex

Geneva – Switzerland

Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality

Tuesday, 11 March 2025

Trusteeship Council Room, UN Headquarters, New York,

Geneva, 28 January 2025

Dear Madam President,

Dear Mr. President,

The Parliamentary Meeting at the 69th session of the Commission on the Status of Women (CSW69) will be held in New York on Tuesday, 11 March 2025. It is hosted by the Inter-Parliamentary Union and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women). This year's Parliamentary Meeting will mark the 30th anniversary of the Beijing Declaration and Platform for Action in line with the CSW69 main theme *The review and appraisal of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of the 23rd special session of the General Assembly*.

The theme of Parliamentary Meeting is *Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality*. The aim of the meeting is to bring a parliamentary perspective into the CSW69 discussions by providing a platform to examine the role of parliaments in advancing the Beijing Declaration and Platform for Action. The meeting will offer an opportunity for members of parliament from around the world to mobilize against the gender equality backlash and revive their commitment to the development, implementation, and enforcement of policies and action plans to achieve gender equality and fulfil women's and girls' rights and empowerment. I enclose the concept note, provisional agenda and other relevant documents.

I wish to strongly encourage your Parliament to request that your country's delegation to the 69th session of the Commission on the Status of Women includes both male and female members of parliament, notably chairpersons and members of gender equality, social affairs, budget or human rights committees. This would ensure their attendance and contribution to the IPU-UN-Women Parliamentary Meeting. It would also facilitate the inclusion of a parliamentary perspective in the CSW69 that will take place from 10 to 21 March 2025.

In addition to the Parliamentary Meeting, the IPU will be organizing side events during the first week of the CSW69. Additional information will be provided soon.

Registration can be completed [here](#). Additional information related to the Parliamentary Meeting, including relevant documents, is available on the IPU dedicated webpage [here](#). We would be grateful if you could complete your registration **by Monday, 24 February 2025**.

We look forward to welcoming a delegation of your Parliament to the annual Parliamentary Meeting.

Yours sincerely,

Martin Chungong
Secretary General



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women

Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality

A parliamentary event organized by the Inter-Parliamentary Union and UN-Women
at the 69th Session of the Commission on the Status of Women

11 March 2025, Trusteeship Council Room, UN Headquarters, New York

INFORMATION NOTE

During the 69th Session of the United Nations Commission on the Status of Women (CSW69), whose priority theme is *The review and appraisal of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of the 23rd special session of the General Assembly*, the Inter-Parliamentary Union (IPU) and UN-Women are organizing a parliamentary meeting entitled:

Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality.

The meeting will take place on **Tuesday, 11 March 2025**, from 10:00 to 13:00 and from 15:00 to 17:30 in the Trusteeship Council Room, at the UN Headquarters, in New York.

Objectives

In keeping with its policy of contributing to major international forums by seeking to introduce a parliamentary dimension into the proceedings of intergovernmental organizations, the IPU is organizing this one-day meeting jointly with UN-Women to provide a forum for debate on the above topic between parliamentarians from all over the world, and to contribute to the deliberations of CSW69.

The Parliamentary Meeting will provide a platform to examine the role of parliaments in advancing the Beijing Declaration and Platform for Action. The meeting will offer an opportunity for members of parliament from around the world to mobilize against the gender equality backlash and revive their commitment to the development, implementation, and enforcement of policies and action plans to achieve gender equality and fulfil women's and girls' rights and empowerment. Particular focus will be placed on shifting paradigms towards parity in decision-making.

The concept note, the meeting agenda and other relevant documents are available at this [link](#).

Expected outcome

A brief message to the CSW69 will be issued, stressing areas for priority action, with particular emphasis on the role of parliaments.

Relevant documents

Background documents to be used throughout the meeting include:

- Written contributions of the panellists, when available
- CSW69 documents, when available.

Participants

The participants in the parliamentary event will include:

- Parliamentarians present in New York who are participating at CSW69 as members of their respective delegations. The IPU Secretary General will be extending a letter of invitation to the Parliamentary Meeting to all IPU Member and non-member Parliaments.
- Representatives of governments, relevant organizations and funds of the United Nations system, and civil society.

Programme

09:45–10:00	Arrival of delegates
10:00–10:15	Opening remarks
10:15–12:00	Session 1: Women's political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity
12:00–13:00	Special segment: Panel discussion on shifting the paradigm towards parity Presentation of General Recommendation 40 of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW) on the equal and inclusive representation of women in decision-making systems followed by a Q&A session with participants.
13:00–15:00	Lunch break
15:00–17:00	Session 2: Pushing back against the pushback
17:00–17:30	Wrap up and concluding remarks

Languages

Simultaneous interpretation will be provided in four languages: Arabic, English, French and Spanish.

Access badges for United Nations Headquarters

Security arrangements during General Assembly sessions are very strict and no one may enter the United Nations premises without a special badge (for delegates and visitors). In keeping with normal practice, delegations and diplomatic missions in New York will attend to all matters relating to visas, UN badges, hotel reservations and transportation.

Participants must therefore request their badge from their country's Permanent Mission to the United Nations in New York.

Registration for the meeting

Persons wishing to participate in the parliamentary event are urged to register as soon as possible using the online form available at [this link](#). If you require any additional information regarding registration, please contact Ms. Marie-Graziella NGUINI (e-mail: mgn@ipu.org / Phone: +41 22 919 41 45) and Mr. Ilias TROCHIDIS (e-mail: gender@ipu.org / Phone: +30 69 445 141 55).

Informal side-event(s)

In addition to the parliamentary meeting, the IPU will be organizing side events in the course of the first week of the CSW69. Additional information will be provided soon.

Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality

A parliamentary event organized by the Inter-Parliamentary Union and UN-Women
at the 69th Session of the Commission on the Status of Women

11 March 2025, UN Headquarters, Trusteeship Council Room, New York

CONCEPT NOTE AND PROVISIONAL AGENDA

Thirty years after the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA) and a decade into the United Nations sustainable development agenda, despite notable progress achieved towards gender equality in certain areas, significant gaps exist, and serious challenges persist.

Gaps and challenges worsen amidst a backdrop of overlapping global crises, attempts of rollback in gender equality, and women's and girls' rights and freedoms, and serious backlash on women's empowerment, their protection from gender-based violence and harassment, including online, and on sexual and reproductive health and rights across the globe.

The effects of unrest, conflict and war are strongly felt by women. They suffer various harms, including sexual and gender-based violence, loss of spouses, families, livelihoods and of personal autonomy. Even during transitional and peacebuilding periods, women often remain marginalized.

The rollback on reproductive health, rights and justice is intensifying with bans or limitations on abortion and reduced punishment for marital rape. In several countries there have been attempts to reinstate banned, harmful practices such as female genital mutilation (FGM) or early marriages. Proposals have been put forward to weaken laws that protect women and girls from gender-based violence, including undermining protection for survivors of gender-based violence. The growing challenges to protect women's reproductive rights are adding to the overall backlash against women's rights, destabilizing the lives of women, girls and societies at large. The backlash and the continued systemic gaps hinder women's full participation in economic, social and political life, limiting their opportunities for empowerment and autonomy.

The year 2024, a "so-called" super election year, brought more setbacks than achievements for women in decision-making. Women's representation in parliaments stagnated at 27% globally with a decrease rather than an increase in the number of women MPs among the newly elected parliaments. Only five women were elected as Heads of State out of 31 direct presidential elections held worldwide. Forming gender parity cabinets continued to be the exception rather than the norm. Additionally, women politicians globally continue to experience gender-based violence, including in parliament, highlighting the persistent barriers to their safety and participation.

Beyond parliament, violence against women remains alarmingly prevalent, affecting one in three women globally, underscoring the persistent threat to women's safety and well-being. Discriminatory laws continue to undermine the rights of women and girls, particularly in critical areas such as sexual and reproductive health



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women

rights (SRHR). Every two minutes, a woman dies from childbirth-related causes – a statistic that has stagnated – while an estimated 270 million women lack access to modern family planning methods.¹

The digital sphere and developments in artificial intelligence (AI) present new challenges, as gender biases are being embedded into their development and operations, perpetuating and amplifying existing inequalities. Intentions and commitments announced by social media networks to reduce moderation on their platforms are flagrant setbacks after many years of calls made by women, women's rights movements and human rights defenders to put in place frameworks to address online gender-based violence, harassment, deepfakes and misinformation against women.

However, a transformative force is resisting backlash, striving for societies that are just, inclusive, peaceful, and sustainable for all. Feminism has never been more mainstream, nor mobilized as many young people as it does today.² This force comprises millions of women and girls worldwide, supported by their movements and allies, including men and boys. 2024 marked landmark victories: in the Gambia, plans to repeal the ban on FGM, mobilized local, national, regional and global pushback against the pushback, culminating in the Parliament's decision to uphold the ban; in France, the Parliament voted overwhelmingly to enshrine abortion rights in the constitution, being the first country in the world to do so. In 2024, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women (CEDAW Committee) launched its landmark General Recommendation 40 on the equal and inclusive representation of women in decision-making systems, offering authoritative guidance for a paradigm shift towards parity in decision making.

Parliaments are central institutions in resisting rollback on women's rights, shifting paradigms and ensuring the effective implementation of the international normative framework, including the Beijing Declaration and Platform for Action.

With this in mind, the IPU and UN-Women are organizing their annual Parliamentary Meeting on the occasion of the 69th session of the Commission on the Status of Women (CSW69) on the theme: *Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality*.

Objective

The Parliamentary Meeting will provide a platform to examine the role of parliaments in advancing the Beijing Declaration and Platform for Action on the occasion of the latter's 30th anniversary. The meeting will offer an opportunity for members of parliament from around the world to mobilize against the backlash and revive their commitment to the development, implementation, and enforcement of policies and action plans to achieve gender equality and fulfill women's and girls' rights and empowerment. Particular focus will be placed on shifting the paradigm towards parity in decision-making.

Date and time

The Parliamentary Meeting will be held in person on United Nations Headquarters' premises, in the Trusteeship Council Room on Tuesday, 11 March 2025.

Languages

Interpretation will be provided in English, French, Arabic and Spanish.

¹ See in: www.who.int/news/item/23-02-2023-a-woman-dies-every-two-minutes-due-to-pregnancy-or-childbirth--un-agencies.

² [EGM/B30/2024/REPORT](#), pg. 15.



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women

Programme

Chair: President of the IPU Bureau of Women Parliamentarians

09:45–10:00 **Arrival of delegates**

10:00–10:15 **Opening remarks**

- IPU
- UN-Women

10:15–12:00 **Session 1: Women's political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity.**

Participants will review the latest data and resources on women in politics. These include the IPU's report *Women in Parliament 2024* and the IPU-UN Women 2025 Map Women in Politics. The session will provide space to take stock of the global state of women's representation in political decision-making over the past 30 years, highlighting progress and persistent challenges, and identifying lessons learned. It will also provide an opportunity to take a look at the elections held in 2024 and their outcomes in terms of women's political representation.

The session will focus on the following questions:

- What progress has been made in advancing women's representation in parliament and political leadership globally over the past 30 years?
- What are the main observations drawn from the 2024 election results regarding women's participation in decision-making?
- What are the barriers blocking greater progress and how can they be addressed?
- What lessons can be drawn from countries that have demonstrated significant progress towards gender parity in politics, and how can these successes inform global efforts?
- How can we inspire and support the next generation of women leaders to take on political roles?

12:00–13:00 **Special segment: Panel discussion on shifting the paradigm towards parity**

Presentation of General Recommendation 40 of the UN CEDAW Committee on the equal and inclusive representation of women in decision-making systems followed by a Q&A session with participants.

13:00–15:00 **Lunch break**

15:00–17:00 **Session 2: Pushing back against the pushback**

This session will focus on setbacks and dangers of pushbacks that hinder progress on gender equality and women's rights, and primarily on parliamentary action needed to address such challenges. The participants will identify pushbacks, their supporting forces and the damage they cause. They will also explore actionable solutions to



Inter-Parliamentary Union
For democracy. For everyone.



United Nations Entity for Gender Equality
and the Empowerment of Women

reverse the backlash and sustain momentum towards gender equality, including through global partnerships, towards the implementation of the BPfA and SDG agendas.

The session will focus on the following questions:

- In which areas are pushbacks most pervasive and what damage are they are creating?
- What transformative actions can parliaments take to safeguard advancements in gender equality?
- How can parliaments be gender-sensitive institutions able to push back against the pushback?
- What partnerships are needed to address the rollback on women's rights?

17:00–17:30

Wrap up and concluding remarks



the 69th Session of the Commission on the Status of Women

New York, 11 Maret 2025

Catatan Singkat tentang Komisi Status Perempuan (CSW)

Ikhtisar: Komisi Status Perempuan (CSW) adalah badan antar-pemerintah global utama yang didedikasikan secara eksklusif untuk mempromosikan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. CSW merupakan komisi fungsional dari Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) yang didirikan melalui resolusi ECOSOC 11(II) pada 21 Juni 1946¹.

Fokus Utama: Fokus utama CSW adalah mempromosikan hak-hak perempuan dan anak perempuan, mendokumentasikan realitas kehidupan mereka di seluruh dunia, dan membentuk standar global tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Pada tahun 1996, ECOSOC memperluas mandat Komisi ini untuk memantau dan meninjau kemajuan serta masalah dalam pelaksanaan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, serta mengarusutamakan perspektif gender dalam kegiatan PBB¹.

Kegiatan Utama: Selama sesi tahunan dua minggu, perwakilan dari Negara Anggota PBB, organisasi masyarakat sipil, dan entitas PBB berkumpul di markas besar PBB di New York. Mereka membahas kemajuan dan kesenjangan dalam pelaksanaan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing 1995, serta isu-isu baru yang mempengaruhi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan¹.

Tujuan:

1. Mempercepat Kemajuan: Negara-negara anggota sepakat untuk mengambil tindakan lebih lanjut guna mempercepat kemajuan dan mempromosikan hak-hak perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial.
2. Rekomendasi: Hasil dan rekomendasi dari setiap sesi diteruskan ke ECOSOC untuk tindak lanjut¹.

Metode Kerja: Komisi mengadopsi program kerja multi-tahun untuk menilai kemajuan dan membuat rekomendasi lebih lanjut guna mempercepat pelaksanaan Platform Aksi. Rekomendasi ini berbentuk kesimpulan yang disepakati tentang tema prioritas. Komisi juga berkontribusi pada tindak lanjut Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk mempercepat realisasi kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan².

Signifikansi: CSW memainkan peran penting dalam mempromosikan hak-hak perempuan, mendokumentasikan realitas kehidupan perempuan di seluruh dunia, dan membentuk standar global tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Partisipasi aktif dari perwakilan negara anggota, organisasi masyarakat sipil, dan entitas PBB sangat penting untuk mencapai tujuan ini².



the 69th Session of the Commission on the Status of Women

New York, 11 Maret 2025

Catatan Singkat tentang Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69)

Ikhtisar: Sesi ke-69 Komisi Status Perempuan (CSW69) akan berlangsung dari 10 hingga 21 Maret 2025, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York. Sesi ini menandai peringatan 30 tahun Deklarasi dan Platform Aksi Beijing, sebuah kerangka kerja penting untuk memajukan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan secara global.

Fokus Utama: Fokus utama CSW69 adalah meninjau dan menilai pelaksanaan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing. Ini termasuk menilai kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi tantangan saat ini, dan mengevaluasi dampak dari upaya ini dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Sesi ini juga akan berkontribusi pada realisasi Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Tema Kunci:

1. **Tinjauan Kemajuan:** Mengevaluasi kemajuan dalam representasi perempuan dalam kepemimpinan politik dan pengambilan keputusan selama 30 tahun terakhir.
2. **Tantangan dan Kemunduran:** Mengatasi hambatan yang terus-menerus dan kemunduran terbaru dalam kesetaraan gender, termasuk penurunan hak-hak perempuan dan kesehatan reproduksi.
3. **Kekerasan Berbasis Gender:** Menyoroti masalah kekerasan berbasis gender dan pelecehan yang terus berlanjut, baik secara online maupun offline, dan membahas langkah-langkah untuk mengatasi tantangan ini.
4. **Hak Reproduksi:** Fokus pada penurunan hak kesehatan reproduksi dan dampaknya terhadap otonomi dan kesejahteraan perempuan.
5. **Ruang Digital dan AI:** Memeriksa bias gender yang tertanam dalam pengembangan dan operasi kecerdasan buatan dan platform media sosial, serta implikasinya terhadap kesetaraan gender.

Tujuan:

- **Mobilisasi Melawan Kemunduran:** Mendorong anggota parlemen untuk melawan kemunduran hak-hak perempuan dan memperbarui komitmen mereka terhadap kesetaraan gender.
- **Pengembangan Kebijakan:** Mempromosikan pengembangan, pelaksanaan, dan penegakan kebijakan dan rencana aksi untuk mencapai kesetaraan gender.



the 69th Session of the Commission on the Status of Women

New York, 11 Maret 2025

- **Kemitraan Global:** Memperkuat kemitraan global dan kolaborasi untuk mengatasi penurunan hak-hak perempuan dan mendukung pelaksanaan Deklarasi dan Platform Aksi Beijing.

Signifikansi: CSW69 menyediakan platform penting bagi negara anggota, entitas PBB, dan organisasi non-pemerintah untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan merumuskan strategi untuk memajukan kesetaraan gender. Sesi ini bertujuan untuk menginspirasi dan mendukung generasi pemimpin perempuan berikutnya dan menciptakan dunia yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan untuk semua.

Ringkasan Laporan Nasional Beijing Platform for Action (BPfA) +30 Indonesia

Bagian 1: Sorotan Indonesia telah mencapai kemajuan dalam pembangunan manusia, dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Laporan ini merupakan refleksi kolektif dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait tentang implementasi, pencapaian, praktik terbaik, tantangan, dan pelajaran yang dipetik dari BPfA selama lima tahun terakhir.

Bagian 2: Prioritas, Pencapaian, Tantangan, dan Kemunduran

- **Aspek Kebijakan dan Regulasi:** Indonesia telah mengesahkan berbagai kebijakan progresif untuk melindungi perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, dan komunitas adat dari segala bentuk kekerasan.
- **Aspek Kelembagaan:** Penguatan implementasi pengarusutamaan gender melalui strategi yang dikembangkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Dalam Negeri.
- **Aspek Penganggaran dan Pelayanan Publik:** Integrasi Penganggaran Responsif Gender dalam Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Sistem Penandaan Anggaran.
- **Lima Prioritas:** Penghapusan kekerasan terhadap perempuan, pendidikan berkualitas, kewirausahaan perempuan, akses ke layanan kesehatan, dan pencegahan diskriminasi.

Bagian 3: Kemajuan Terkait 12 Area Kritis BPfA

- **Pembangunan Inklusif, Kemakmuran Bersama, dan Pekerjaan Layak:** Peningkatan akses perempuan ke pekerjaan layak dan pengembangan ekonomi.



the 69th Session of the Commission on the Status of Women

New York, 11 Maret 2025

- **Pengentasan Kemiskinan, Perlindungan Sosial, dan Layanan Sosial:** Program bantuan sosial dan perlindungan sosial yang menargetkan perempuan dan anak-anak.
- **Kebebasan dari Kekerasan, Stigma, dan Stereotip:** Implementasi UU TPKS dan strategi nasional untuk menghapus kekerasan terhadap anak.
- **Partisipasi, Akuntabilitas, dan Institusi Responsif Gender:** Peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan dan kepemimpinan.
- **Masyarakat Inklusif dan Damai:** Implementasi RAN P3AKS dan peningkatan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian.
- **Konservasi Lingkungan, Perlindungan, dan Rehabilitasi:** Pengarusutamaan gender dalam aksi iklim dan pengelolaan hutan sosial.

Bagian 4: Proses dan Mekanisme untuk Mempromosikan Kesenjangan Gender

- **Strategi Nasional untuk Mempromosikan Kesenjangan Gender:** Integrasi strategi pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dan daerah.
- **Pelacakan Anggaran untuk Kesenjangan Gender:** Implementasi Penganggaran Responsif Gender di tingkat nasional dan daerah.
- **Partisipasi Pemangku Kepentingan dalam Implementasi BPfA:** Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam proses penyusunan laporan BPfA+30.

Bagian 5: Data dan Statistik

- **Pencapaian dalam Data dan Statistik Terpisah Gender:** Integrasi isu gender dalam survei dan studi utama yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik.
- **Prioritas Masa Depan untuk Data dan Statistik Gender:** Penguatan koordinasi lintas sektor dan peningkatan kapasitas untuk menghasilkan data dan statistik gender yang kredibel.
- **Indikator Gender Khusus untuk Pemantauan Pencapaian SDGs:** Pengembangan indikator SDGs yang mencakup aspek gender untuk memantau kemajuan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.



the 69th Session of the Commission on the Status of Women

New York, 11 Maret 2025

Bagian 6: Jalan ke Depan

- **Lingkungan yang Mendukung:** Menciptakan lingkungan yang mendukung untuk implementasi kebijakan kesetaraan gender.
- **Harmonisasi Kebijakan:** Harmonisasi kebijakan dan regulasi di tingkat nasional dan daerah.
- **Penguatan Peran Kepemimpinan:** Penguatan peran kepemimpinan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam memimpin program kesetaraan gender.
- **Pemantauan dan Evaluasi:** Mempertahankan dan meningkatkan mekanisme pemantauan dan evaluasi untuk implementasi BPfA dan SDGs.
- **Aksi Afirmasi:** Implementasi kebijakan aksi afirmasi untuk mempromosikan kepemimpinan perempuan.

Laporan ini menyoroti pentingnya kerangka kebijakan yang kuat, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi pemangku kepentingan dalam mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan di Indonesia.



the 69th Session of the Commission on the Status of Women

New York, 11 Maret 2025

Parliaments and Beijing +30: Resisting the backlash and shifting paradigms towards gender equality

**A parliamentary event organized by the Inter-Parliamentary Union and
UN-Women at the 69th Session of the Commission on the Status of
Women**

DAY 1

**Session 1—Women's political participation: Progress, setbacks and lessons
learned for a way forward to achieving parity.**

***Honorable Chair,
Honorable Delegates,
Ladies and gentlemen.
Good morning/afternoon.***

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

It is truly an honour to be here with all of you today to reflect on the progress made since the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action 30 years ago.

From the Indonesian Parliament's perspective, the issue of women's political participation reflects both significant progress and ongoing challenges. Over the years, Indonesia has made strides toward increasing women's representation in the political sphere. Policies like the 30% gender quota have increased women's representation in elections, leading to more women in legislative positions. In addition, in the 2024 election the proportion of women in the Indonesian Parliament is rise to 21,9 percent, reflecting a gradual but consistent growth in female political representation, although still below the 30 percent target for gender equality.

However, setbacks remain. Cultural and structural barriers, such as gender stereotypes and political financing constraints, continue to limit the full participation of women in politics. Women often face greater challenges than men in securing party



the 69th Session of the Commission on the Status of Women

New York, 11 Maret 2025

nominations, and gender biases can influence the political discourse and decision-making processes. Moreover, women are still underrepresented in key political roles, such as ministerial positions or leadership roles within Parliament.

We must take decisive action to address the systemic gaps that hinder women's full participation in all aspects of life. This includes enacting and enforcing laws that protect women and girls from gender-based violence, ensuring access to reproductive health services, and promoting women's representation in political leadership.

In Indonesia, we are committed to these goals. By prioritizing women's voices in policy development, enacting gender-sensitive legislative reforms, and promoting political education and awareness, Indonesia can make further strides toward achieving gender parity in its political landscape. Allow me to draw your attention that the Indonesian Parliament has enacted at least two significant laws to support women. The first one is the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) which serves as a landmark legal framework to address sexual violence in Indonesia. The second is the Law on Mother and Child Welfare which emphasizes the importance of maternal care during pregnancy and childbirth.

I believe increasing women's leadership is essential to achieving the SDG5 on gender equality and crucial to advancing broader development goals, including poverty reduction, economic development, and peacebuilding. Together, let us commit to these priorities and work towards a future where women's voices are heard, valued, and represented in all areas of leadership and decision-making.

Thank you.

Special segment: Panel discussion on shifting the paradigm towards parity

Beberapa pertanyaan dapat diajukan oleh delegasi BKSAP DPR RI:



the 69th Session of the Commission on the Status of Women

New York, 11 Maret 2025

1. How effective are quota systems and what other measures should countries pursue and implement?
2. How can parliaments effectively integrate the general recommendation into our legislative, budgeting, and oversight function?
3. What indicators or metric should be utilized to evaluate progress and achievement of the general recommendations?
4. Beside legislative actions, how can we change perceptions or stereotypes of people who feel threatened with women's participation and representation in politics?



the 69th Session of the Commission on the Status of Women

New York, 11 Maret 2025

Session 2: Pushing back against the pushback

*Honorable Chair,
Honorable Delegates,
Ladies and gentlemen.
Good morning/afternoon.*

My name is _____. I am the Chair/Vice-Chair/Member of the Committee for Interparliamentary Cooperation of the Indonesian House of Representatives.

From the Indonesian perspective, addressing the setbacks and dangers of pushbacks against gender equality and women's rights is crucial. Despite progress, we face significant challenges that require decisive parliamentary action.

Identifying Pushbacks: Pushbacks are most pervasive in areas such as reproductive rights, gender-based violence, and political representation. These pushbacks create significant damage by undermining women's autonomy, safety, and participation in decision-making processes.

Transformative Actions: Parliaments can take transformative actions to safeguard advancements in gender equality by:

1. **Strengthening Legislation:** Enacting and enforcing laws that protect women's rights and promote gender equality.
2. **Promoting Gender-Sensitive Policies:** Ensuring all policies are inclusive and consider the unique needs of women.
3. **Supporting Women's Leadership:** Encouraging and facilitating women's participation in political and leadership roles.

Gender-Sensitive Institutions: To push back against the pushback, parliaments must become gender-sensitive institutions by:



the 69th Session of the Commission on the Status of Women

New York, 11 Maret 2025

1. **Implementing Gender Quotas:** Ensuring a minimum representation of women in parliamentary seats.
2. **Providing Training and Support:** Offering training programs to enhance women's leadership skills and capacities.
3. **Creating Safe Environments:** Establishing mechanisms to protect women politicians from gender-based violence and harassment.

Building Partnerships: Addressing the rollback on women's rights requires strong partnerships. We need to collaborate with:

1. **International Organizations:** Working with bodies like the UN and regional organizations to align efforts and share best practices.
2. **Civil Society:** Engaging with NGOs and women's groups to amplify voices and drive grassroots change.
3. **Private Sector:** Partnering with businesses to promote gender equality in the workplace and beyond.

By taking these actions, we can reverse the backlash and sustain momentum towards gender equality. Together, we can ensure the effective implementation of the Beijing Platform for Action and the Sustainable Development Goals, creating a more just and inclusive society for all.

Thank you.

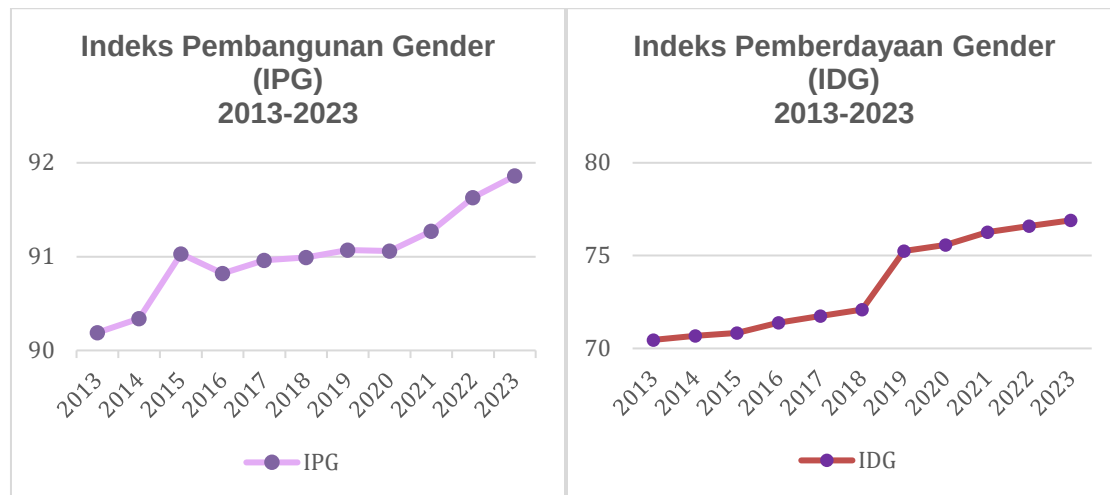
Bahan Masukan
untuk Partisipasi Delegasi DPR RI dalam pertemuan *The Parliamentary Meeting at the 69th session of the Commission on the Status of Women (CSW 69)* dan *IPU Global Conference of Women Parliamentarians*

A. Latar Belakang: Kondisi Kesetaraan Gender di Indonesia

1. Indonesia secara konsisten memiliki komitmen yang kuat dalam pengarusutamaan gender di seluruh bidang pembangunan, baik tingkat nasional, kawasan, maupun global.
2. **Di tataran internasional**, komitmen tersebut diwujudkan Indonesia dengan meratifikasi berbagai Instrumen HAM internasional dan menerapkan kesepakatan internasional seperti:
 - a. *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)*;
 - b. *Beijing Declaration and Platform for Action (BPfA)*; dan
 - c. *Sustainable Development Goals (SDGs)*.
3. Langkah tersebut menunjukkan **komitmen jangka panjang** Indonesia dalam pemenuhan kesetaraan gender yang tercermin dalam penyampaian **laporan nasional secara rutin** atas berbagai Instrumen HAM internasional dan kesepakatan internasional dimaksud mengenai perkembangan pemajuan kesetaraan gender di Indonesia.
 - ➔ Laporan nasional dimaksud disampaikan secara terbuka untuk memperoleh masukan dari pemerintah negara lain maupun *independent experts*, mengenai arah kebijakan maupun penerapannya yang dapat mempengaruhi kesetaraan gender di Indonesia, di tingkat nasional maupun daerah.
 - ➔ Pemri telah menyampaikan Laporan 30 Tahun Implementasi *Beijing Platform for Action* (Beijing+30) pada Mei 2024 lalu, dan sedang dalam proses penyusunan laporan periodik implementasi Konvensi CEDAW ke-9.
4. Adapun **di tingkat nasional**, komitmen tersebut diterjemahkan ke dalam berbagai kerangka Kebijakan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan penghormatan terhadap hak-hak perempuan dan percepatan integrasi kesetaraan gender di dalam pembangunan nasional, seperti:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang memosisikan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender sebagai indikator dalam Agenda Pembangunan; serta
 - b. Rencana Aksi HAM (RAN HAM) 2021-2025 yang menempatkan perempuan sebagai kelompok sasaran prioritas pembangunan nasional.
5. Secara umum pada periode 2013–2023 terdapat tren positif peningkatan sejumlah indikator kesetaraan gender, yakni Indeks Pembangunan Gender (**IPG**) dan Indeks Pemberdayaan Gender (**IDG**).

Catatan:

- IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan dengan IPM Laki-laki dan mengacu kepada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung *Gender Development Index* (GDI). Semakin kecil jarak antara angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki.
- IDG bertujuan untuk menjadi indikator peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik, dan diukur berdasarkan dimensi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan.

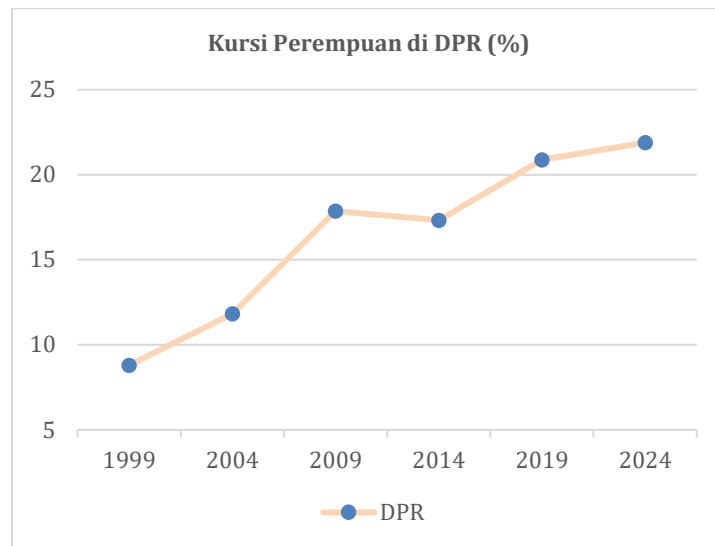


Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS), 2013–2023.

- ➔ **IDG Indonesia** sudah mencapai nilai >70 sehingga termasuk dalam **kategori “tinggi”** berdasarkan rentang penilaian yang ditetapkan oleh BPS. Namun demikian, **IPG Indonesia** masih dalam kategori **“menengah-rendah”** berdasarkan standar perhitungan universal yang ditetapkan oleh UNDP.

B. Keterwakilan dan Partisipasi Perempuan dalam Politik

6. Selama tiga dekade terakhir, representasi perempuan dalam politik global mengalami kemajuan yang signifikan, didorong oleh berbagai kebijakan afirmatif, reformasi kelembagaan, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.
7. Di Indonesia, upaya untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik mulai terlihat dengan diterapkannya kebijakan kuota gender dalam UU Pemilu, yang mewajibkan partai politik mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif.
 - ➔ Sejak ketentuan ini diberlakukan, jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan yang bertahap.
 - ➔ Pada Pemilu 1999 hanya 9% anggota DPR yang merupakan perempuan, angka ini meningkat menjadi 17,3% pada 2014 dan mencapai 20,5% pada 2019.
8. Namun demikian, keterwakilan dan partisipasi bermakna perempuan di lembaga legislatif, **masih perlu ditingkatkan** untuk mendorong pengambilan kebijakan yang bersifat lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan.
 - ➔ Secara umum, target keterwakilan perempuan di badan legislatif (30%) masih belum tercapai kendati telah diterapkannya kebijakan afirmasi kandidat perempuan (*zipper system*) untuk Pemilu Legislatif.
 - ➔ Pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024, ditemukan bahwa 17 dari 18 partai politik masih belum capai kuota keterwakilan perempuan di seluruh daerah pemilihan (84 daerah).
 - ➔ DPR Telah mempublikasikan bahwa perempuan menduduki 127 dari 580 kursi di DPR (21,90%), sementara belum terdapat publikasi resmi mengenai jumlah perempuan yang menduduki posisi sebagai DPRD secara nasional.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024.

C. Kekerasan terhadap Perempuan dalam Politik

9. Kekerasan masih menjadi ancaman besar bagi perempuan yang terlibat dalam politik baik secara daring maupun luring.
 - ➔ Politikus perempuan menjadi sasaran intimidasi, pelecehan, kampanye hitam, hingga ujaran kebencian dan penyebaran berita palsu. Dalam konteks digital, media sosial sering menjadi sarana bagi aktor-aktor politik tertentu untuk mendiskreditkan perempuan.
10. Pemri menerapkan **kebijakan nol toleransi terhadap segala bentuk kekerasan terhadap perempuan**, termasuk dalam konteks pelaksanaan Pemilu 2024, dan mengambil berbagai langkah mendorong penciptaan lingkungan politik yang lebih aman bagi perempuan.
 - ➔ Bawaslu dan Komnas Perempuan telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pencegahan dan pemantauan kekerasan terhadap perempuan dalam pemilu serta pemilihan kepala daerah, serta membangun kawasan kerja bebas kekerasan terhadap perempuan.
 - ➔ Bawaslu juga telah menyusun "Panduan Teknis Pemantauan dan Pelaporan Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan di Pemilu" untuk mendorong respon cepat terhadap laporan kekerasan yang bertujuan untuk memastikan pemilu yang adil dan bebas dari kekerasan berbasis gender.

D. Tantangan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan

11. Meskipun kebijakan afirmatif seperti kuota gender telah diterapkan di Indonesia, hambatan-hambatan yang bersifat sistemik masih menghalangi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dan bermakna dalam proses politik dan pengambilan keputusan, seperti:
 - a. Miskonsepsi bahwa dunia politik lebih cocok untuk laki-laki dibandingkan perempuan;
 - b. Banyaknya partai masih didominasi oleh elit politik laki-laki, dan relatif sulitnya perempuan untuk mendapatkan dukungan internal;
 - c. Tantangan bagi perempuan dalam mengakses sumber daya politik dan finansial.
12. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan, antara lain:
 - a. Menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif dan aman bagi perempuan;
 - b. Menerapkan reformasi dalam sistem partai politik untuk lebih melibatkan perempuan;

- c. Menyediakan ruang lebih besar bagi kader perempuan dalam posisi strategis, termasuk di tingkat kepemimpinan partai
 - d. Pendidikan politik dan kepemimpinan bagi anak perempuan sejak dini; serta
 - e. Mendorong dukungan masyarakat sipil maupun media dalam mengubah narasi tentang kepemimpinan perempuan.
13. Adapun, Pemri telah mengambil berbagai langkah strategis, di antaranya:
- a. Menyusun **Grand Design Peningkatan Keterwakilan Perempuan di DPR, DPD, dan DPRD 2020-2029**, yang mencakup kebijakan afirmatif, peningkatan kapasitas, serta penguatan regulasi untuk memperkuat peran perempuan di ranah politik dan pemerintahan.
 - b. Penerapan **Program Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Pedesaan**, yang dirancang untuk membangun kapasitas perempuan di tingkat akar rumput agar dapat berperan aktif dalam pengambilan keputusan dan menjadi agen perubahan di komunitas mereka.
 - c. Program **Desa Ramah Perempuan dan Anak**, yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan desa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan perempuan dan anak, utamanya dengan mendorong perempuan untuk mengambil peran dalam pengelolaan desa, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun pemerintahan.
 - d. Peluncuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) oleh Bappenas, dalam rangka tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia.
 - e. Pembentukan Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) untuk mendorong keterwakilan perempuan di posisi strategis/kunci di parlemen.

E. Posisi Pemerintah Indonesia

14. Saat ini, Indonesia terus mendorong peran perempuan dalam mengatasi berbagai tantangan dan persoalan global dengan cara:
- a. Mendorong **kepemimpinan** dan peran perempuan dalam **pengambilan keputusan**.
 - b. Mempromosikan peran penting dan kontribusi perempuan dalam menciptakan **peluang ekonomi dan memberdayakan masyarakat lokal**.
 - c. **Penghapusan diskriminasi** terhadap perempuan guna menciptakan lingkungan yang dapat mengeluarkan seluruh potensi yang dimiliki oleh perempuan
15. Untuk itu, dan sejalan dengan komitmen dalam berbagai kesepakatan internasional, pemberdayaan perempuan difokuskan pada empat sektor prioritas, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik melalui:
- a. **Meningkatkan akses pendidikan dan pelayanan kesehatan**, dengan memfasilitasi akses kepada pendidikan terutama bagi perempuan, meningkatkan literasi, keterampilan hidup dan pendidikan politik, serta akses layanan kesehatan reproduksi;
 - b. **Melindungi perempuan dari diskriminasi dan kekerasan**, termasuk penyelundupan dan perdagangan orang;
 - c. Memfasilitasi **partisipasi ekonomi** melalui kolaborasi dengan pihak swasta dalam beberapa bidang seperti peningkatan kapasitas, akses ke layanan keuangan, penciptaan bursa tenaga kerja, dan literasi digital;
 - d. **Peningkatan kesadaran** yang berfokus terhadap peran ganda perempuan, seperti mendukung prinsip-prinsip kesetaraan gender dan kesadaran gender.



@bksapdpr



@bksapdpr



bksapdpr



bksapdpr



Produced by:

COMMITTEE FOR INTER-PARLIAMENTARY
COOPERATION
INDONESIAN HOUSE OF
REPRESENTATIVES
(BKSAP DPR RI)

Email: biro_ksap@dpr.go.id

Phone: (62-21) 5715813

ksap.dpr.go.id